



# **Laporan Keuangan Partai Politik**

Disampaikan dalam Seminar Nasional Reformasi Keuangan Partai Politik :  
Peluang dan Tantangan

**Linggar Yekti Nugraheni., SE., M.Com., Akt., Ph.D, CA**

# DASAR ACUAN

- Undang-Undang no 2 tahun 2011 : UU tentang Partai Politik
- Permendagri no 36 tahun 2018 : Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
- Permendagri no 78 tahun 2020 : Perubahan Atas Permendagri no 36 tahun 2018 yang mengakomodasi situasi Pandemi Covid
- Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (SAK)
- Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 : Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Non Laba

# UU no. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (pasal 39 ayat 1,2)



Pengelolaan keuangan Partai Politik dilakukan secara transparan dan akuntabel



Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik

Audited



Berdasar Standar  
Akuntansi yang berlaku



SAK atau SAP



## UU no. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (pasal 39 ayat 3)

- Laporan realisasi anggaran
- Neraca
- Laporan arus kas



PENGGUNA  
LAPORAN  
KEUANGAN  
PARTAI  
POLITIK

### **Pihak internal meliputi**

- Dewan pengurus partai
- Anggota partai

### **Pihak eksternal meliputi**

- Masyarakat umum
- Pemerintah
- Badan pengawas partai politik, dan
- Pihak-pihak yang memberikan bantuan atau sumbangan dana seperti donatur

# Akuntabilitas dan Transparansi - Public Sector

- Stakeholder dan masyarakat memerlukan informasi mengenai suatu entitas / organisasi publik untuk mengetahui bagaimana pengelola melaksanakan tugasnya menuju tujuan organisasi dan bagaimana sumber daya dikelola.
- Organisasi sektor publik memiliki tujuan berbeda dibandingkan dengan organisasi privat sehingga diperlukan informasi yang berbeda.
- Untuk menyusun informasi apa yang disampaikan perlu adanya standar sehingga terjadi kontrak kesepakatan antara penyusun, pemakai, pemeriksa dalam menyusun dan memahami informasi tersebut.
- Tujuan dari organisasi sektor publik, besarnya akuntabilitas, ukuran, sumber daya yang dikelola akan banyak mempengaruhi informasi apa yang disajikan dan standar apa yang akan digunakan untuk menyusun informasi tersebut.

# Partai Politik

- UU No. 2/2011 tentang Partai politik
- Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- Didaftarkan ke Kementerian untuk menjadi badan hukum dan pengesahan partai politik menjadi badan hukum dilakukan dengan Keputusan Menteri dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

# Partai Politik

Partai Politik berfungsi sebagai sarana :

- Pendidikan Politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara;
- Partisipasi politik warga Negara Indonesia ; dan
- Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

# Partai Politik

- Keuangan Partai Politik bersumber dari:
  - iuran anggota;
  - sumbangan yang sah menurut hukum; dan
  - bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Sumbangan berupa uang, barang, dan/atau jasa.
- Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

# Entitas Publik

## Organisasi Publik Non Pemerintah

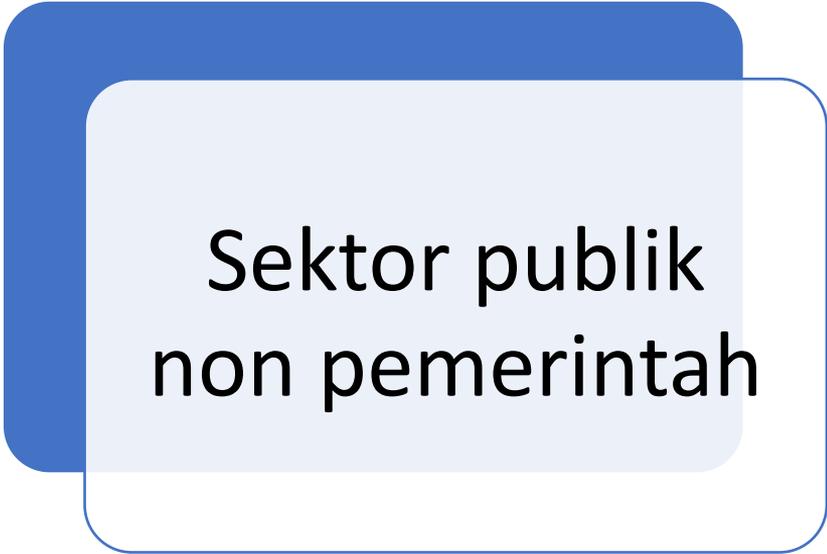
Organisasi kemasyarakatan, Yayasan, lembaga keagamaan

Di Indonesia, standar akuntansinya mengacu pada PSAK 45 → digantikan ISAK 35 tetap mengacu pada PSAK dan SAK ETAP

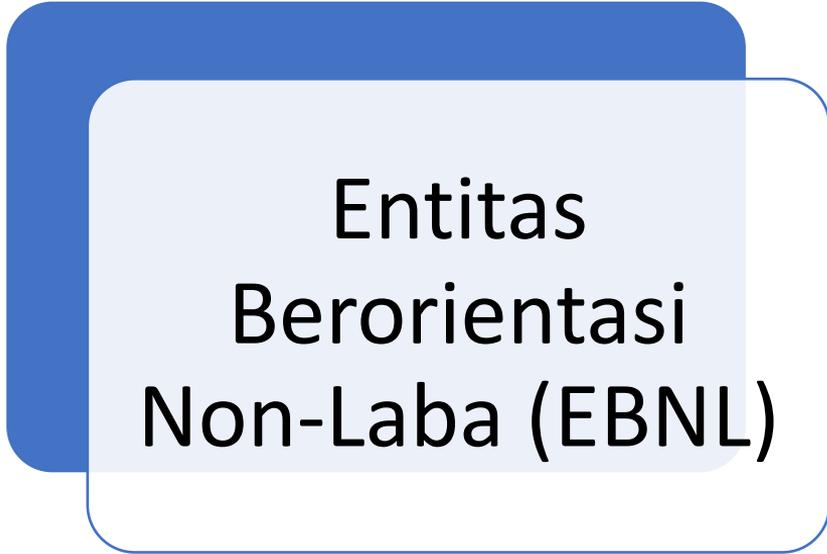
## Organisasi Publik Pemerintah

SAP Standar Akuntansi Pemerintahan  
PP 71 tahun 2010

# Partai Politik



Sektor publik  
non pemerintah



Entitas  
Berorientasi  
Non-Laba (EBNL)

## ISAK 35-par 07 :

- Apakah sumber daya EBNL berasal dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomik yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan;
- Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan jika entitas berorientasi non laba menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada pendiri atau pemilik entitas berorientasi nonlaba tersebut;
- Tidak ada kepemilikan seperti umumnya pada entitas bisnis berorientasi laba, dalam arti bahwa kepemilikan dalam entitas berorientasi non laba tidak dapat dijual, dialihkan atau ditebus kembali atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas berorientasi nonlaba pada saat likuidasi atau pembubaran entitas berorientasi non laba.

# DASAR PENCATATAN LAPORAN KEUANGAN

## Basis Akrual

- Transaksi diakui dan dicatat dalam pembukuan partai politik pada saat terjadinya, bukan pada saat uang diterima atau uang dibayarkan.

## ISAK 35

- ISAK 35 merupakan standar penyajian laporan keuangan untuk entitas berorientasi non-laba (EBNL, mengacu pada PSAK 1 *Penyajian Laporan Keuangan*)
- Standar pengakuan dan pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan dapat mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Indonesia, dan mengikuti ISAK 35 untuk penyajian laporan keuangan.
- ISAK 35 memberikan gambaran bagi EBNL tentang bagaimana cara melakukan penyesuaian terhadap beberapa pos dalam laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan karakteristik ENBL itu sendiri, misalnya partai politik dapat menyajikan jumlah sumber daya berdasarkan sifatnya, yaitu pada adanya pembatasan atau tidak adanya pembatasan oleh pemberi sumber daya.

# Jenis Laporan Keuangan Partai Politik

Masing-masing tingkatan diharapkan dapat menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang diterima partai politik. Laporan Keuangan Partai Politik di setiap tingkatan dapat terdiri dari :

- Laporan dana kampanye
- Laporan keuangan bantuan dana politik yang bersumber dari dana APBN/APBD
- Laporan keuangan dana politik yang bersumber dari iuran anggota, sumbangan pihak ketiga yang sah menurut hukum

Laporan keuangan tahunan terdiri dari laporan dana kampanye, laporan bantuan dari APBN/APBD, dan laporan dana politik sumbangan pihak ketiga yang sah menurut hukum

Partai politik di tingkat pusat dapat menyusun laporan keuangan gabungan yang mencakup laporan keuangan pada tingkatan dengan level yang berbeda



# Jenis Laporan Keuangan

- Laporan posisi keuangan
- Laporan penghasilan komprehensif (laporan aktivitas)
- Laporan perubahan aset bersih
- Laporan arus kas
- Catatan atas laporan keuangan
- Laporan realisasi anggaran (laporan pertanggungjawaban) - lampiran

# Laporan Keuangan Tahunan

## 01 Laporan Posisi Keuangan (Neraca)

mencakup besarnya aset (harta), liabilitas (kewajiban) dan aset neto yang dimiliki oleh partai politik

<b>PARTAI MATAHARI</b>			
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN</b>			
Per 31 Desember 2021			
<b>ASET</b>		<b>LIABILITAS</b>	
<b>ASET LANCAR</b>		<b>LIABILITAS LANCAR</b>	
Kas dan Setara Kas	135,000,000	Biaya yang masih harus dibayar	300,000,000
Bank	350,000,000	Utang pajak	5,000,000
Piutang lancar	50,000,000		
Piutang tidak lancar	15,000,000		
Perlengkapan	17,000,000		
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>	<b>567,000,000</b>	<b>LIABILITAS TIDAK LANCAR</b>	
		Utang bank	120,000,000
<b>ASET TETAP</b>		Utang pihak ketiga	65,000,000
Peralatan	30,000,000		
Akumulasi penyusutan - peralatan	(1,000,000)	<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>490,000,000</b>
Kendaraan	480,000,000		
Akumulasi penyusutan - kendaraan	(54,000,000)	<b>ASET NETO</b>	
Bangunan	1,020,000,000	Tanpa pembatasan (without restrictions) dari pemberi sumber daya	2,116,500,000
Akumulasi penyusutan - bangunan	(32,500,000)	Dengan pembatasan (with restrictions) dari pemberi sumber daya	100,000,000
Tanah	1,000,000,000	Surplus (Defisit)	303,000,000
<b>TOTAL ASET TETAP</b>	<b>2,442,500,000</b>	<b>TOTAL ASET NETO</b>	<b>2,519,500,000</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>3,009,500,000</b>	<b>TOTAL LIABILITAS DAN ASET NETO</b>	<b>3,009,500,000</b>

# Laporan Keuangan Tahunan

02

## Laporan Penghasilan Komprehensif

- Menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran atau beban yang berbasis aktivitas yang mencerminkan kinerja partai politik.
- Terdapat dua macam aktivitas yang dilaporkan yaitu kegiatan di luar kampanye (untuk laporan keuangan tahunan) dan kegiatan kampanye (laporan dana kampanye).

PARTAI MATAHARI LAPORAN AKTIVITAS Per 31 Desember 2021		
	TANPA PEMBATAAN	DENGAN PEMBATAAN
PERUBAHAN ASET NETO		
Penerimaan		
-Iuran Anggota		
-Sumbangan anggota	600,000,000	
-Sumbangan non anggota		100,000,000
Total Penerimaan	600,000,000	100,000,000
Pengeluaran		
-Beban administrasi dan umum		
1. Beban listrik, telepon dan In	10,000,000	
2. Beban rapat internal	50,000,000	
3. Beban gaji dan tunjangan	150,000,000	
4. Beban seragam	30,000,000	
-Beban publikasi dan humas		
-Fee ahli pengacara	50,000,000	
Beban penyusutan	7,000,000	
Total Pengeluaran	297,000,000	0
KENAIKAN ASET NETO	303,000,000	100,000,000
ASET NETO AWAL TAHUN	2,116,500,000	
ASET NETO AKHIR TAHUN	2,419,500,000	100,000,000

# Laporan Keuangan Tahunan

## 04 Laporan Arus Kas

- Menunjukkan aliran kas (*cash flow*) yang diterima dan dikeluarkan pada suatu periode berdasarkan aktivitas yang dilakukan oleh partai politik.
- Terdiri dari tiga komponen yaitu: arus kas dari aktivitas operasi, arus kas dari aktivitas pendanaan dan arus kas dari aktivitas investasi

### PARTAI MATAHARI LAPORAN ARUS KAS Per 31 Desember 2021

#### AKTIVITAS OPERASI

Penerimaan Kas dari :	
Kas negara melalui APBN	0
Iuran anggota	0
Sumbangan anggota	600,000,000
Sumbangan non anggota	100,000,000
Jumlah	700,000,000

#### Pengeluaran Kas untuk :

Beban administrasi dan umum	(240,000,000)
Beban publikasi dan humas	(50,000,000)
Hutang	0
Jumlah	(290,000,000)

Kas Neto yang digunakan untuk aktivitas operasi 410,000,000

#### AKTIVITAS INVESTASI

Pembelian aset tetap (675,000,000)

Kas Neto yang digunakan untuk aktivitas invest (675,000,000)

#### PENURUNAN KAS

KAS AWAL 750,000,000  
KAS AKHIR 485,000,000

# Laporan Keuangan Tahunan

## 05 Catatan Atas Laporan Keuangan

- Menyajikan hal-hal penting yang berkaitan dengan laporan keuangan
- Informasi yang disajikan dalam CALK adalah :
  1. Informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
  2. Informasi yang diisyaratkan dalam SAK tetapi tidak disajikan dalam laporan keuangan.
  3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi relevan untuk memahami laporan keuangan.
- CALK disajikan dengan sistematika :
  1. Informasi Partai Politik
  2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
  3. Pengungkapan Lain

# LAPORAN REALISASI ANGGARAN

---

Merupakan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran oleh partai politik.

---

Penyusunan laporan realisasi anggaran diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no 78 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018

---

Bantuan keuangan partai politik yang berasal dari APBN/APBD harus dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan di bawah ini, yaitu :

---

a) Pendidikan Politik bagi anggota partai politik dan masyarakat (seminar, lokakarya, workshop)

---

b) Operasional Sekretariat Partai Politik (administrasi, berlangganan barang dan jasa, pemeliharaan data dan arsip, pemeliharaan peralatan kantor)

# LAPORAN KEUANGAN GABUNGAN

Menghindari paraktek-praktek tidak sehat di partai politik.  
Laporan keuangan gabungan akan mencegah adanya penerimaan ganda akibat adanya pihak yang memberikan sumbangan kepada partai politik yang sama di tingkat yang berbeda dengan jumlah yang melebihi ketentuan undang-undang.

**. Terima Kasih**